



KPU
KABUPATEN PACITAN



LAPORAN

KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KPU Kabupaten Pacitan
Jalan Veteran No. 66 Pacitan
Kode Pos : 63512
Telp./Fax. (0357) 881122

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Pacitan Tahun 2018 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LK Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, Sekretariat KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU, serta menjadikan Sekretariat KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja Setjen KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Sekretariat KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU pada tahun 2018 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target

dansesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian danevaluasi dari LK Setjen KPU Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pacitan, Januari 2019

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan



BAMBANG SUTEJO

DAFTAR ISI	
Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Kelembagaan KPU	3
D Struktur Organisasi	4
F. Sistematika	5
Bab II. Perencanaan Kinerja	
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019	6
B. Rencana Strategis 2015 – 2019	10
C. Rencana Kinerja Tahunan	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	20
B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan	54
Bab IV. Penutup	
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
Lampiran 2: Pengukuran Kinerja KPU Tahun 2018	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat 4 sub bagian yang menjadi tanggung jawab Sekretariat KPU untuk mengelolanya dalam rangka mendukung kinerja KPU.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2018, dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah dalam artian tahapan Pemilu yang berhimpitan. Selesai melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, KPU langsung menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil juga dapat ditegakkan. Selain itu, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja. Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2018 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.

- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU;
- b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
- c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
- d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
- e. Pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana.
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
 - a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitandengan Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Selain capaian kinerja tersebut, KPU juga melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan Pemilihan. Berbagai sistem informasi digunakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG). Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses public atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

Berbagai capaian kinerja tersebut, KPU mendapat pengakuan publik yang tidak sedikit. Setidaknya terdapat 8 (delapan) penghargaan yang diperoleh KPU terkait dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018. Penghargaan itu diantaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Daftar pemilih Terbaik Kedua Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Sidalih Terbaik Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Teknis Penyelenggara Pemilu Terbaik ke-3 Se Provinsi Jawa Timur;

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Teknis Penyelenggara Pemilu Terbaik ke-2 Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Tingkat KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan Kategori B (Terbuka).

Kedepan, Sekretariat KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimalakan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat KPU. Sekretariat KPU sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

LK Sekretariat KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU selama Tahun Anggaran 2018, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Sekretariat Tahun 2018 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, Sekretaris KPU bertugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban
7. KPU; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

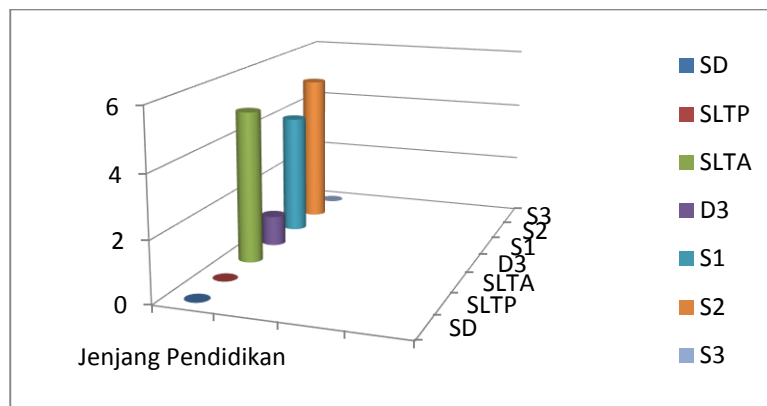
Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
3. Ssub Bagian Hukum;
4. Sub Bagian Umum.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Pacitan didukung oleh 15 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.



Dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan D3 sebanyak 1 Orang Sarjana S1 yaitu 4 orang dan S2 sebanyak 5 orang selebihnya SLTA sebanyak 5 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Grafik berikut:

Ketua

DAMHUDI
Divisi Keuangan Umum
dan Logistik

Anggota

SULIS STYORINI Anggota KPU Divisi Teknis dan Hupmas	SUHARDI Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas	MAHFUD Anggota KPU Divisi Hukum	SITTAH ANNANGIMAH AQ, Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data
--	--	--	--

Plt. Sekretaris
BAMBANG SUTEJO

Sub.bag. Program Data	Sub.bag. Teknis Pemilu & Hupmas	Sub.bag Hukum	Sub.bag. Keuangan, Umum, & Logistik
Danang Kuntadi	Bambang Sutejo	Yayuk Susilowati	Haning Wahyu P
Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana
1. Sutikno, S.Sos 2. Mei Triastuti, S.Ip	1. Rindarto, S.Sos 2. Suyudi	1. Taukid 2. Sri Atmini	1. Mudjahidin 2. Siti Azizah 3. Edy Darmadi, A.Md 4. Toni CN 5. Katwaji, S.Sos

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaantugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman,adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antarasebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
2. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
3. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
4. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
5. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
6. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
7. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
8. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi.
9. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

1. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
2. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
3. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi

1. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
2. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
3. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
4. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
5. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
6. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:

1. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
2. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
4. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
5. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
6. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;

7. Kampanye publik terkait reformasi mental;
8. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
9. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;

Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:

1. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
2. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
3. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:

1. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
3. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi KPU dalam setiap lima tahun adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki

kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu–isu strategis.

1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga

berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetapanegaraan;
6. Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

b. Sasaran

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran- sasaran strategis Sekretariat KPU yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi.
2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM.
3. Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
4. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang- undangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
 - b. Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP
5. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
- 7. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Pacitan			
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan;	2 Laporan
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid;	90%
3	Terselesaikannya laporan permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	78%
4	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan sesuai ketentuan	87%
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu			
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan pemilu/ pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/ pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
3	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	90%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data			
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan renja K/L dan RKA KL	77,50%
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100 % penerapan
2	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	persentase fasilitasi kerjasama KPU Kab. Pacitan dengan lembaga lain	77,50%
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	78%
		Persentase tercapainya target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja	65,00%

4	Tersedianya data dan informasi kepemiluan	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	85%
2	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan BMN KPU	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab Pacitan ke dalam aplikasi SIMAK	100%
3	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100,00%
5	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	100%
6	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	70%
7	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan	70%
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu	80%
		Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	80%
9	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang berKTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90%
Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Pacitan			
1	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	85%
2	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kab. Pacitan minimal B	100%
3	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana			

1	Meningkatnya sarana dukungan transportasi/mobilitas pegawai	persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	100%
2	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik di kantor KPU Kab. Pacitan	100%
3	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan Kantor KPU Kab. Pacitan	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor KPU Kab Pacitan/tersedianya gedung dan gudang yang memadai untuk KPU Kab. Pacitan	100%
Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu			
1	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	87%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU	87%
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	87%
2	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan LDK, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	88%
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	88%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	91%
		terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	91%
		terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	91%
Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu			
1	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Kab Pacitan yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		terlaksananya pembentukan PPID	100 &
		Persentase penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014	75%

		Persentase Jumlah data serta dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100%
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	91
		persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, pada tanggal 07 Januari 2018 Sekretariat KPU telah menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018. PK Tahun 2018 tersebut mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasional	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Pacitan dengan lembaga riset Kepemiluan	85%
2	Terwujudnya Data Pemilih Yang Terkini	Persentase KPU Kabupaten Pacitan dalam Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pacitan Dalam Mendistribusikan Logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
4	Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Pegawai Terhadap Standart Kompetensi	90%
5	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1	Tersusunnya Rancangan dan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Yang Disusun Dan Diharmonisasikan Dengan Tepat Waktu Sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pacitan Yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal	100%

	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	15.426.390.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1.908.662.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 menentukan indikator- indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Setjen KPU Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan - satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2018 adalah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU				
Laporan sistem akuntansi Dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	98,63%
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	96,60%

(LPPA)				
Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	98,01%
Layanan perkantoran	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Layanan	1 Layanan	90,85%
Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu				
Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu /pemilihan	Perencanaan dan kebutuhan logistik pemilu dan pilkada	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Layanan pengadaan logistik Pemilu	Jumlah, jenis, alokasi dan pengadaan logistik Pemilu yang tepat	1 Layanan Pengadaan	1 Layanan Pengadaan	99,04%
Pengadaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	Persentase dokumentasi data kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	93,24%
Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	Persentase dalam menginventarisir dan memelihara logistic Pemilu sebelum pelaksanaan Pemungutan suara	8 Unit		64,75%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data				
Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	95,45%
Dokumen pemutakhiran data pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat wilayah	1 Dokumen	2 Dokumen	70,63%
Analisis capaian kinerja	Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu serta dokumen SAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	88,41%
Penyusunan Anggaran Pemilu	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 Dokumen	1 Dokumen	97,00%
Monitoring dan Evaluasi Pemilu	Persentase laporan monitoring evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	98,04%
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	Persentase tercapainya data pemilih yang akurat dan mutakhir	1 Dokumen	1 Dokumen	96,28%
Layanan Teknologi Informasi Pemilu	Penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan	1 Layanan Bulan	1 Layanan Bulan	98,74%

Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Prosentase laporan pembentukan badan adhock	1 Dokumen	1 Dokumen	99,13%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				
Laporan Persediaan (Stock Opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu	1 Unit	1 Unit	99,13%
Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 Dokumen	1 Dokumen	98,65%
Penyusunan Arsip Pemilu	Persentase jumlah arsip inaktif yang dikelola sesuai penerapan kaidah kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	45,19%
Pengamanan Tahapan Pemilu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	12 Layanan	12 Layanan	86,86%
Layanan Perkantoran	Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 Bulan Layanan	1 Bulan Layanan	98,86%
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	1 Laporan	1 Laporan	94,07%
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana				
Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi	1 Unit	1 Unit	95,91%
Penyiapan Peraturan Perundang- undangan Pemilu dan Pemilukada				
Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan Pemilu dan Pemilukada	Persentase ketepatan waktu penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/Pemilihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	73,03%
Dana Kampanye	Persentase Pedoman Teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang	1 Laporan	1 Laporan	90,86%

	disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu			
Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	1 Kasus	1 Kasus	42,69%
Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu	Persentase Pedoman Teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu	1 Calon	1 Calon	42,24%
Verifikasi Partai Politik	Persentase Pedoman Teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu	1 Partai Politik	1 Partai Politik	72,23%
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW				
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Terlaksananya fasilitasi Pendidikan Pemilih	1 Sartker	1 Satker	72,91
Rancangan/Pedoman//Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Persentase KPU dalam Penyelenggaraan tahapan pemilihan	1 Juklak/Juknis	1Juknis	92,72%
Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	Persentase KPU dalam penyelenggaraan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	96,67%
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase KPU dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	1 Orang	1 Orang	97,81%

Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Persentase KPU dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	1 Laporan	1 Laporan	85,74%
Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93,56%
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	71,10%
Pendidikan Pemilih Pemilu	Persentase Terbentuknya pusat pendidikan pemilih	3 kegiatan	3 Kegiatan	97,76%

Bahwa dari 3 (tiga) program kerja terdapat 36 (tiga puluh enam) sasaran kinerja, yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sisanya belum mencapai target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekjen KPU (3355).

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja diatas yaitu:

1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksanakannya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berbasis akrual KPU Tingkat UAKPA	2 Laporan	2 laporan	98,68%	2 Laporan

Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulan dan Semesteran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran.2018. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN.

Sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan tiap bulan, diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Pengelolaan dokumen Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan.

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersusunnya Laporan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran / LPPA (3355.007)	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran / LPPA yang tepat waktu dan valid	90%	96,60%	93,75%	12 Laporan

Output yang telah dicapai adalah Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran

dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi melalui aplikasi SAIBA.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan aplikasi SILABI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pacitan (KPPN).

Menyampaikan ke KPU Provinsi Jawa Timur Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara rutin tiap bulan sekali selama 1(satu) tahun. Melakukan Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan Semester II/ Laporan Tahunan Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 ke KPU RI. Realisasi anggaran yang terserap pada tahun anggaran 2018 adalah Rp 18.580.458.154 atau 91.74 % dari pagu anggaran.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I dan II juga menyusun laporan persediaan Tahun 2018 dan laporan Barang Milik Negara tahun 2018, yang sudah dilaksanakan rekonsiliasi dengan KPKNL.

3) Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (3355.009)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan (3355.009)	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	78%	98,01%	79,59%	10 Bulan layanan

Bentuk kegiatan yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Pacitan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 78.223.000,- dan direalisasikan sepanjang tahun 2018 sebesar Rp. 76.663.000,-yaitu Sosialisasi pedoman pelaksanaan keuangan tahapan pemilu 2019; Pelaksanaan bimbingan teknis pedoman pelaksanaan keuangan tahapan pemilu 2019; Monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan BP Adhoc; Reviu penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan BP Adhoc.

4) Layanan Perkantoran. (3355.994)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terselesaikannya Permasalahan Layanan Perkantoran dalam Pengelolaan Keuangan (3355.994)	Persentase Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Perbendaharaan dan Sistem Akuntansi Pelaporan Gaji dan Tunjangan pada KPU Kab. Pacitan	78 %	90,82 %	96,67 %	12 Bulan layanan

Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan dengan melakukan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, tunjangan khusus bagi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I. Pengajuan SPM ke KPPN baik SPM UP/ TUP/ Gaji/ Uangmakan/ uang lembur/ Tunjangan khusus/ LS, serta mengarsip dan mendokumentasikan semua transaksi pengeluaran.

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356)

1) Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan (3356.008)	Persentase satker yang menyelenggarakan pemilu/ pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	Pelaporan dalam aplikasi SILOG dan SIRUP LKPP

Pelaksanaan kegiatan ini berupa koordinasi perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/pemilihan serta penganggarannya dengan melakukan perencanaan

kebutuhan logistic Tahun 2019 untuk bahan rapat koordinasi di Provinsi Jawa Timur serta membayarkan honor operator SIRUP dan operator SILOG KPU Kabupaten Pacitan. Tugas Operator SIRUP mengupload ke dalam aplikasi SIRUP kebutuhan pengadaan barang dan jasa KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sedangkan Operator SILOG memelihara dan merencanakan kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2019.

Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 berdasarkan DIPA TA. 2018. Penayangan RUP ini dilakukan melalui aplikasi SIRUP LKPP oleh operator SIRUP KPU Kabupaten Pacitan sehingga publik dapat mengetahui dan mengakses informasi tentang RUP KPU Kabupaten Pacitan TA. 2018.

2) Layanan pengadaan logistik Pemilu (3356.009)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan (3356.009)	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/ pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian	100 %	99,04 %	99,04 %	E-procurement

Dalam rangka pelayanan pengadaan logistik pemilu tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan bimbingan teknis e-tendering dan e-purchasing yang dihadiri oleh pejabat pengadaan. KPU kabupaten Pacitan menghadiri kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapabilitas dan keterbukaan pengadaan melalui sistem elektronik. Tahun 2018 telah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog.

3) Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (3356.014)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat (3356.014)	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	100 %	93,24 %	96,67%	Dokumen pengelolaan logistik

Bentuk Kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan adalah 1) Bimbingan teknis rencana kebutuhan dan anggaran logistik pemilu 2019, 2) Bimbingan teknis pelaksanaan e-procurement (sirup dan e-tendering) pengadaan logistik pemilu 2019, 3) Supervisi dan monitoring pengadaan logistik pemilihan 2018, 4) Bimbingan teknis mekanisme pendistribusian logistik pemilu 2019 menggunakan teknologi informasi, 5) Fasilitasi penghapusan logistic, 6) Bimbingan teknis dan sosialisasi mekanisme penghapusan logistik pemilihan 2018, 7) Fasilitasi pengembangan dan integrasi SILOG Keperluan Pemilu 2019, 8) Fasilitasi pengelolaan logistik pemilu 2019, 9) Persiapan pelaksanaan pengadaan Logistik Pemilu 2019.

4) Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan (3356.015)	Persentase Satker Dalam Menginventarisir Dan Memelihara Logistik Pemilu Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilu	100 %		64,75%	8 Unit

Dalam anggaran tahun 2018 dan guna menunjang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2018 KPU Kabupaten Pacitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana Keperluan Pemilu melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengadaan logistik pemilu 2019 berupa

kelengkapan pemilu 2019, 2) Pengadaan Komputer / PC, 3) Pengadaan Fasilitas kegiatan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi Laporan keuangan, 4) Pengadaan Fasilitas Alat Penghitungan Suara.

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas (3357)	Persentase program kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan (3357.004)	1005	100%	95,45%	1 Laporan

Pada akunt ini Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan matrik rencana aksi kinerja pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR; menentukan sasaran keuangan dan fisik Triwulan I sampai dengan Trwiulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 melalui aplikasi e-monev.bappenas.co.id, Selanjutnya menentukan prosentase capaian output berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 melalui aplikasi e-monev.kemenkeu.co.id. Output dari kegiatan ini (3357.004) adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan (laporan triwulan berdasarkan PP 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan Laporan bulanan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 dengan aplikasi).

2) Dokumen pemutakhiran data pemilih (3357.010)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersedianya data dan Informasi dan sarana serta prasarana tehnologi informasi (3357)	Persentase KPU dalam memutakhirkan data pemilih (3357.010)	100%	100%	70,63%	1 Dokumen

Pada akunt ini KPU Kabupaten Pacitan melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun 2018 berbasis data, seperti:

- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih menggunakan aplikasi Sidalih;
- b. Melakukan koordinasi dengan disdukcapil;
- c. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur Terkait data pemilih;
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PPK diviisi data pemilih.
- e. Melakukan monitoring kegiatan data pemilih ke PPK masing- masing Kecamatan.

3) Analisis Capaian kinerja (3357.026)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien (3357)	Persentase KPU yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja (3357.026)	70%	70%	88,41%	1 Dokumen

Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa instrument yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Fisik dari Triwulan I s.d Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Capaian Output berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 dilaksanakan tiap bulan pada minggu I, Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ tahun 2018) baik untuk Sekretariat KPU dan Komisioner dan penyusunan Perjanjian Kinerja KPU serta Sekretaris KPU tahun 2018 dan menyampaikan Dokumen LKJ dan Dokumen SAKIP berupa perjanjian kinerja Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ke KPU Provinsi Jawa Timur.

4) Penyusunan Anggaran pemilu (3357.032)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	97%	97,00%	1 Dokumen

Pada akunt ini KPU Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Melakukan pencermatan anggaran belanja operasional maupun non operasional baik rutin maupun tahapan. Melakukan revisi anggaran baik revisi administrasi maupun revisi pergeseran anggaran. Kegiatan ini didukung dengan anggaran yang ada di DIPA sebesar Rp. 119.563.000,00 dengan peruntukan berupa honor pokja, belanja paket meeting dalam kota, belanja modal yang telah di belanjakan berupa 1 buah laptop, dan belanja perjalanan dinas luar kota untuk mengikuti rakor di provinsi Jawa Timur yang telah terserap sebesar Rp.115.981.300,00 (97,00%).

5) Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	98,04%	1 Dokumen

Pada akunt ini KPU Kabupaten Pacitan melakukan beberapa kali rapat kerja atau rapat koordinasi dengan PPK 12 Kecamatan Se kabupaten Pacitan, memenuhi undangan rakor dengan KPU Povinsi dan melakukan penyusunan laporan evaluasi tahapan penyelenggaraan tahapan pemilihan 2018. Kegiatan ini di dukung anggaran sebesar Rp 97.635.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 95.719.000,00 (98,04%).

6) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Ttersedianya, dan informasi dan sarana dan prasarana tehnologi informasi	Persentase KPU dalam memutakhirkan data pemilih	100%	100%	96,28%	1 Dokumen

Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun 2018 berbasis data dengan menggunakan aplikasi SIDALIH dengan melakukan Input data

melalui aplikasi SIDALIH. Untuk mendapatkan updating data KPU Kabupaten Pacitan melakukan koordinasi berbagai pihak terkait secara rutin dan melakukan kegiatan sesuai tahapan yaitu:

a. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 oleh KPU RI terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) bersama dengan Operator dan Ketua Divisi Program dan Data Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur :

- a. Pada tanggal 29 dan 30 Mei 2018 terkait Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Pada tanggal 10 Juli 2018 terkait Penyusunan Daftar pemilih Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Pada tanggal 25 Juli 2018 terkait Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2018 terkait Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Pada tanggal 13-14 September 2018 Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT tingkat Provinsi Jawa Timur.

2. Rapat Koordinasi dengan PPK:

- a. Pada tanggal 25 Mei 2018 terkait Persiapan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Pada tanggal 1 Juni 2018 terkait Time Line Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- c. Pada tanggal 13 Juni 2018 terkait Persiapan Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - d. Pada tanggal 11 Juli 2018 terkait Penyusunan Formulir Model A.B.DPSHP-KPU dalam rangka Menuju Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - e. Pada tanggal 21 Juli 2018 terkait Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten/Kota.
 - f. Pada tanggal 02 Agustus 2018 terkait Penggunaan Formulir AB-KPU dalam Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) Pemilu 2019 bersama dengan PPK Divisi Data Se-Kab. Pacitan.
 - g. Pada tanggal 16 Agustus 2018 terkait Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT Kabupaten Pacitan bersama dengan PPK dan Bawaslu beserta Panwascam.
 - h. Pada tanggal 17 Agustus 2018 dengan tema unggah Sialih bersama dengan Operator PPK.
 - i. Rapat Koordinasi Penyusunan AB pasca rekap PPK dan unggah Sialih pada tanggal 19-20 Agustus 2018 bersama dengan PPK terkait dengan Hasil Tindak Lanjut Pencermatan Bawaslu tentang Data Ganda DPSHP Pemilu 2018.
 - j. Pada tanggal 07 September 2018 Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu terkait data ganda pada DPT Pemilu 2019.
 - k. Pada tanggal 11 September 2018 dengan agenda Persiapan Penetapan DPTHP Pemilu 2019.
3. Rapat Koordinasi dengan Bawaslu:
- a. Pada tanggal 28 Agustus 2018 terkait dengan Hasil Pencermatan Bawaslu pasca Penetapan DPT Pemilu 2019.

- b. Pada tanggal 12 September 2018 Rapa Koordinasi bersama Bawaslu Kab. Pacitan, Peserta Pemilu 2019 dan KPU Kab. Pacitan dengan agenda Penghapusan Data Ganda Hasil Pencermatan DPT Pemilu 2019.
 4. Rapat Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Penyusunan DPSHP Akhir pada tanggal 1-2 Agustus 2018.
- c. Pelaksanaan

Sesuai dengan tahapan KPU Kabupaten Pacitan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan DPHP Pemilu 2019 bersama PPK se-Kabupaten Pacitan.
2. Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran PPK dan PPS se-Kabupaten Pacitan.
3. Monitoring Rekap Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
4. Rekapitulasi DPHP dan Penetapan (DPS) Tingkat KPU Kabupaten Pacitan
5. Rekap DPS Tingkat KPU Provinsi
6. Pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan Masyarakat
7. Rakor Penyusunan Perbaikan DPS Pemilu 2019 di Tingkat Provinsi
8. Penetapan DPSHP
9. Pengumuman DPSHP
10. Penyusunan Daftar Pemilih
 - a. Rakor dengan PPK terkait Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir).
 - b. Monitoring Rekap DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan Se - Kabupaten Pacitan
 - c. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Pacitan
 - d. Rapat Koordinasi Unggah Sidalih Pasca Rekapitulasi DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan.

- e. Rapat Koordinasi Penyusunan AB dan Unggah Sidalih Pasca Tindak Lanjut Hasil Pencermatan Bawaslu
 - f. Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Pacitan
 - g. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT Tingkat Provinsi Jawa Timur
 - h. Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Timur
11. Pengumuman DPT
- a. Monitoring Pengumuman DPT Pemilu 2019
 - b. Rapat Koordinasi Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Pasca Penetapan DPT
 - c. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT Hasil Perbaikan Pemilu 2019
 - d. Rapat Koordinasi Penghapusan Data Ganda DPT Pemilu 2019
 - e. Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTHP Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Pacitan
 - f. Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTHP Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Timur
12. Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP)
- a. GMHP KPU Kabupaten Pacitan di Masjid Agung Darul Fallah Kabupaten Pacitan.
 - b. GMHP KPU Kabupaten Pacitan di Gereja Katholik dan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kabupaten Pacitan
 - c. GMHP KPU Kabupaten Pacitan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Pendidikan (STKIP) Pacitan
 - d. GMHP Serentak Nasional 17 Oktober 2018
 - e. GMHP KPU Kabupaten Pacitan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhamadiyah (STITMUH) Pacitan
 - f. GMHP KPU Kabupaten Pacitan di PKK dan Dharma Wanita Kabupaten Pacitan
 - g. GMHP KPU Kabupaten Pacitan di Chandra Kirana Kabupaten Pacitan

- h. GMHP KPU Kabupaten Pacitan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah (STAIFA) Pacitan
 - i. GMHP KPU Kabupaten Pacitan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan
13. Penyempurnaan DPTHP 1 dan DPTHP 2
- a. Rapat Evaluasi Hasil Pencermatan DPTHP-1 dan Persiapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTHP-2 di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur
 - b. Rapat Koordinasi dengan PPK Se Kabupaten Pacitan terkait Coklit Terbatas dan Persiapan Pleno Terbuka di Tingkat Desa dan Kecamatan
 - c. Rapat Koordinasi dengan PPK se Kabupaten Pacitan terkait Hasil Coklit Terbatas
 - d. Monitoring Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) di tingkat Kecamatan Se Kabupaten Pacitan
 - e. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Hasil Rekapitulasi DPTHP-2 dengan Partai Politik dan Bawaslu pada pemilu tahun 2019
 - f. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) di tingkat KPU Kabupaten Pacitan
 - g. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) di tingkat Provinsi Jawa Timur
 - h. Konsultasi Data Pemilih Pasca Penetapan DPTHP-2 di KPU Provinsi Jawa Timur
 - i. Rapat Koordinasi Pemanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP-2 selama 30 hari pada Pemilihan Umum tahun 2019
 - j. Rapat Koordinasi dan Pencermatan bersama Penyempurnaan DPTHP-2 antara KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Partai Politik, dan Pemerintahan Kabupaten Pacitan

- k. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait Pemilih Potensial Non Ktp-el
- l. Rapat Koordinasi Penyelesaian Data Ganda Luar Negeri bersama Bawaslu Kabupaten
- m. Monitoring data Ganda Luar Negeri di Kabupaten Pacitan
- n. Rapat Koordinasi Penyelesaian data Ganda Luar Negeri bersama PPK Divisi Data Pemilih
- o. Unggah Sidalih bersama 2 orang Anggota PPK yang Menangani Data Pemilih
- p. Penyusunan Berita Acara di Tingkat PPK dan PPS dalam Penyempurnaan DPTHP-2
- q. Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten Pacitan
- r. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten Pacitan
- s. Rapat Koordinasi Persiapan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilu 2019 di tingkat Provinsi Jawa Timur

7) Layanan Tehnologi Informasi Pemilu (3357.035)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana tehnologi informasi	jumlah kajian tehnologi informasi dalam pemilu	1 Kajian	1 Kajian	98,74%	1 Layanan Bulan

Pada akunt ini anggaran yang tersedia di gunakan untuk pemeliharaan jaringan LAN yang berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan pengadaan jaringan layanan internet guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2018 karena

banyaknya pekerjaan yang menggunakan aplikasi berbasis internet. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.436.000,00 dan terealisasi sebesar 34,990,000 (98,74%).

8) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock (3357.039)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya koordinasi anatar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu	Persentase fasilitasi kerjasama dengan pihak lain terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	78%	78%	99,13%	1 Dokumen

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen Badan Adhoc Pemilu 2019 tidak serta merta menyusun sendiri tahapan kegiatannya, tetapi selalu berkoordinasi dan dalam petunjuk maupun arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Bentuk koordinasi yang dimaksud adalah dengan mengikuti setiap kegiatan ataupun menghadiri undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur yaitu pada :

a. Menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur

1. Rabu – Kamis, 31 Januari – 1 Februari 2018 = Tempat di Bukit Daun Resort Kediri
2. Rabu – Kamis, 28 Februari – 1 Maret 2018 = Tempat di Hotel Swissbel in Sidoarjo

b. Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan

1. Senin, 5 Februari 2018 = Berita Acara Nomor : 19/BA/II/2018
2. Senin, 19 Februari 2018 = Berita Acara Nomor : 25/BA/II/2018
3. Senin, 12 Februari 2018 = Berita Acara Nomor : 25/BA/II/2018
4. Jum'at, 2 Maret 2018 = Berita Acara Nomor 26/BA/III/2018
5. Senin, 5 Maret 2018 = Berita Acara Nomor 27/BA/III/2018
6. Selasa, 6 Maret 2018 = Berita Acara Nomor 28/BA/III/2018

c. Penyusunan Timeline Rekrutment Badan Adhoc Pemilu 2019

4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)

1) Laporan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya pengelolaan BMN dan persediaan (stock opname) (3360.009)	Persentase laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	100 %	98,91 %	98,91 %	Laporan Persediaan

Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam satu tahun di akhir tahun Stock opname dilaksanakan bulan Desember 2018. Penghitungan barang persediaan telah dilakukan oleh tim stock opname untuk menghitung jumlah kotak suara dalam rangka persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, dihitung jumlah kotak yang baik dan jumlah kotak yang rusak ringan/berat. Hasilnya sudah dilaporkan dalam rapat pleno dan telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Madiun. Disamping itu juga menghitung jumlah tonase surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015 untuk dihapus dari asset persediaan dan selanjutnya untuk dimintakan persetujuan ke KPKNL Madiun. Kegiatan lelang telah dilaksanakan hasil lelang telah disetor ke kas Negara. Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan tertib dan berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator. Laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) telah disusun. Penghapusan BMN dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Eselon I, untuk barang yang rusak berat. Proses inventarisasi barang telah dilakukan dan telah mengajukan ijin penghapusan BMN kepada KPU.

2) Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
-------------------	-------------------	--------	-----------	-----------	--------

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan BMN KPU (3360.010)	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab Pacitan ke dalam aplikasi SIMAK BMN	100%	98,65%	98,65%	Laporan Barang Milik Negara
---	---	------	--------	--------	-----------------------------

Kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan Barang Milik Negara yaitu 1) Update aplikasi SIMAK BMN, 2) Inventarisasi Aset atas barang inventaris kantor, 3) Koordinasi dan evaluasi terkait pengelolaan logistik pemilu / pemilihan, 4) Pemeliharaan logistik pemilu / pemilihan, 5) Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPKNL Madiun, 6) Update informasi terkait petunjuk teknis, perundang – undangan, time schedule dan ketentuan pengadaan.

3) Penyusunan Arsip Pemilu (3360.022)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan (3360.022)	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	70%	70%	45,19%	1 Dokumen

Dalam akunt ini KPU Kabupaten Pacitan melakukan kegiatan 1) Penataan arsip surat keluar dan surat masuk, 2) Pelaksanaan inventarisasi dan tata kelola arsip, 3) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bulanan.

4) Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya layanan dukungan pengamanan tahapan Pemilu (3360.023)	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang berKTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90 %	86,86 %	95,51 %	12 Layanan

Bentuk kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan dalam hal pengamanan tahapan Pemilu adalah 1) Koordinasi dengan dinas instansi terkait, 2) Koordinasi dengan Bawaslu, 3) Koordinasi dengan Peserta Pemilu, 4) Koordinasi dengan Stakeholder.

5) Layanan Perkantoran (3360.994)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (3360.994)	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan operasinal perkantoran sehari – hari	90 %	97,80 %	97,80 %	12 Bulan layanan

a. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan jasa, pembayaran honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat- alat kantor, gedung, dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor digunakan untuk pembayaran belanja pakaian dinas pegawai, satpam, dan pramubhakti, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.

b. Penyedia jasa surat menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di KPU Kabupaten Pacitan merupakan kegiatan antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat- surat sebagai dokumen komunikasi resmi yang berbentuk arsip dinamis dan statis, disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa listrik, telepon dan air guna mendukung kelancaran jalannya operasional kantor. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Pacitan yang disediakan pihak pemberi jasa. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan, Telepon dan air gedung perkantoran.

c. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional / dinas

Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Pacitan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional dinas untuk pelaksanaan service PC/AC/Printer/Laptop dapat berjalan sebagaimana mestinya dan aset bisa operasional dengan baik dan lancar serta pemeliharaan dan perawatan gedung dan halaman agar nyaman dan indah dipandang mata.

d. Honor operasional satua kerja.

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pacitan untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA. 2018, untuk pembayaran honor pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan barang dan Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Untuk meberikan rasa keseragaman dalam satu intitusi Komisi Pemilihan Umum, dan menimbulkan jiwa korsa yang tinggi,dianggarkan utnuk pengadaan pakaian satpam/pramubakti/sopir/ danuntuk ASN, dalam Tahun anggaran 2018 telah diralisasikan untuk pemenuhan seragam Dinas terrsebut.

f. Penyediaan alat tulis Kantor.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis Kantor untuk operasional KPU Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Pacitan sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan. Indikator hasil kegiatan

ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Pacitan.

5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)

1) Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu (3361.009)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersusunnya laporan pemeriksaan anggaran tahapan pemilu (3361.009)	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WDP	75 %	WDP

Kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan dalam pemeriksaan anggaran tahapan pemilu adalah 1) Menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap ada rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP, 2) Penyusunan Laporan Keuangan lebih kompatibel dan dapat dipertanggungjawabkan, 3) Penyusunan Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura KPU (076.01.02)

1. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362)

1) Kendaraan Bermotor (3362.004)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas Kantor (3361.009)	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi	67%	95,94%	100%	1 unit

Kegiatan yang dilakukan adalah 1) Survey pasar dalam perencanaan pengadaan kendaraan, 2) Koordinasi terkait spesifikasi teknis jenis pengadaan kendaraan, 3) Input data pengadaan dalam aplikasi SIRUP dan E-Catalog, 4) Pelaksanaan pengadaan kendaraan melalui E-Catalog.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

1) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya Kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketetapan waktu penyuluhan	87%	100%	100 %	Laporan Perjadin

KPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kompetensi dan penguatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Pelaksanaan kegiatan dengan menghadiri undangan dalam rangka Rakor Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada di Jawa Timur ke KPU Provinsi Jawa Timur dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kabupaten.

2) Dana Kampanye Pemilu (3363.019)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara-raan Pemilu	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan LDK, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik, dan anggota DPD	88 %	100%	100 %	1 laporan

Kegiatan- kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan dalam tahapn dana kampanye adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan Teknis Internal Aplikasi Dana Kampanye.
- b. Sosialisasi Peraturan KPU tentang Dana Kampanye.
- c. Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Kampanye

- d. Tindak lanjut Surat KPU RI Nomor 1112/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018.
- e. Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan.
- f. Penerimaan dan Verifikasi LADK Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pacitan.
- g. Rapat Pleno Penutupan Penerimaan LADK .
- h. Penerimaan LADK hasil Perbaikan.
- i. Rapat Pleno Penerimaan LADK hasil Perbaikan.
- j. Pengumuman Hasil Penerimaan LADK Partai Politik peserta Pemilu 2019.
- k. Tindak Lanjut Surat Dinas KPU RI Nomor 1149/PL.01.01.6-SD/03/KPU/IX/2018.
- l. Bimtek Laporan Sumbangan Dana Kampanye.

3) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya Kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	87%	100%	42,69%	Laporan Perjadin

Pada kegiatan 3363.020 digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU RI. Dalam kegiatan ini dari segi anggaran mampu terserap 43 % atau senilai Rp. 3.837.400,- akan tetapi dari segi kegiatan mencapai target 100% karena KPU RI hanya melaksanakan Bimbingan Teknis dalam 1 (satu) kali kegiatan.

4) Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu (3363.021)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu	Persentase KPU dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	87%	100%	42,24%	Laporan Perjadin

Pada akun kegiatan 3363.021 digunakan untuk Pelaksanaan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Anggota DPD pada Pemilu tahun 2019 tahun anggaran 2018. Adapun rincian serapan anggaran pada kegiatan 3363. 021 adalah sebagai berikut:

- 3363. 021 A 524119 terserap 84 % atau senilai Rp.6.934.300.,- untuk kegiatan perjalanan dalam rangka menghadiri undangan bimbingan Teknis di KPU RI dan KPU Provinsi;
- 3363. 021 B 521211 terserap 67 % atau senilai Rp. 1.930.000.,- untuk kegiatan belanja bahan kegiatan verifikasi dukungan Calon Perseorangan;
- 3363. 021 B 521213 terserap 98 % atau senilai Rp. 36.050.000.,- untuk honor dari output kegiatan verifikasi dukungan Calon Perseorangan;
- 3363. 021 B 521811 terserap 95 % atau senilai Rp. 3.795.000.,- untuk belanja persediaan barang konsumsi dalam kegiatan verifikasi dukungan Calon Perseorangan;
- 3363. 021 B 524113 terserap 21 % atau senilai Rp. 30.900.000.,- untuk kegiatan belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka verifikasi dan klarifikasi keanggotaan calon perseorangan;
- 3363. 021 B 524119 terserap 86 % atau senilai Rp. 10.589.200.,- untuk kegiatan belanja perjalanan paket meeting luar kota dalam rangka menghadiri bimtek Laporan Dana Kampanye di KPU Provinsi;
- 3363. 021 C 521211 terserap 100 % atau senilai Rp. 4.950.000.,- untuk kegiatan belanja bahan kegiatan penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi keanggotaan calon perseorangan;
- 3363. 021 C 521811 terserap 94 % atau senilai Rp. 3.965.000.,- untuk belanja persediaan barang konsumsi dalam kegiatan penetapan Berita Acara Hasil Verifikasi keanggotaan calon perseorangan;
- 3363. 021 C 524119 terserap 93 % atau senilai Rp. 11.401.500.,- untuk kegiatan belanja perjalanan paket meeting luar kota dalam rangka menyampaikan Berita Acara Hasil Hasil Verifikasi keanggotaan calon perseorangan;

5) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (3363.022)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Verifikasi Partai Politik	Persentase Pedoman Teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu	87%	100%	72,23 %	Laporan Perjadin

Pada akun kegiatan 3363.022 digunakan untuk Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 tahun anggaran 2018. Adapun rincian serapan anggaran pada kegiatan 3363. 022 adalah sebagai berikut:

- 3363. 022 A 521211 terserap 85 % atau senilai Rp. 8.400.000,- untuk kegiatan belanja bahan kegiatan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- 3363. 022 A 521213 terserap 100 % atau senilai Rp. 55.700.000,- untuk honor dari output kegiatan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- 3363. 022 A 521811 terserap 97 % atau senilai Rp. 1.950.000,- untuk belanja persediaan barang konsumsi dalam kegiatan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- 3363. 022 A 524113 terserap 48 % atau senilai Rp. 34.834.000,- untuk kegiatan belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- 3363. 022 B 521211 terserap 66 % atau senilai Rp. 13.250.000,- untuk kegiatan belanja bahan kegiatan penetapan dan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Calon Peserta Pemilu;
- 3363. 022 B 521811 terserap 99 % atau senilai Rp. 3.974.500 untuk belanja persediaan barang konsumsi dalam kegiatan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Calon Peserta Pemilu;

- 3363. 022 B 522141 terserap 65 % atau senilai Rp. 16.500.000,- untuk belanja Sewa dalam kegiatan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Calon Peserta Pemilu;
- 3363. 022 B 524111 terserap 95 % atau senilai Rp. 7.524.000,- untuk kegiatan belanja perjalanan dinas dalam rangka menyampaikan Berita Acara Hasil Hasil Verifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi

2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)

1) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3364)	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Dengan Partisipasi Pemilih Rendah (3364.007)	4	4	100 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat Bersama. Kegiatan berjalan lancar dan terkendali. Disamping itu kegiatan Pendidikan Pemilih dengan Indikator Pendidikan Pemilih dengan Partisipasi jumlah pemilih terendah dilakukan di dua desa dua Kecamatan dan sosialisasi pemilih Pemula di sekolah sekolah dengan KPU Goes to school setingkat SMA/SMK serta organisasi kemasyarakatan yang pelaksanaannya merata di sepuluh Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan dengan target kegiatan sebanyak 14 kali. Dalam pelaksanaan sampai akhir desember 2018 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi sebanyak 26 kali.

2) Rancangan Pedoman/ Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu (3364.041)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Output
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3364)	Rancangan Pedoman/ Jukis Penyelenggaraan tahapan Pemilu (3364.041)	2	2	100 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan dari KPU Provinsi Jawa timur dengan agenda kegiatan rapat rancangan penyusunan petunjuk Teknis pendaftaran dan penelitian calon pada Pemilu Tahun 2019 dengan pelaksanaan kegiatan berlangsung sejumlah 2 kali 2 orang dengan dukungan anggaran sejumlah Rp.12.512.000,00.

3) Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu (3364.042)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3364)	Penataan Daerah Pemilihan (3364.042)	3	3	100 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target kegiatan Sosialisasi Penyusunan Daerah Pemilihan dan Perhitungan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Simulasi Penyusunan Daerah Pemilihan

dan Alokasi Kursi, maka dari kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar sebagaimana dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp. 82.879.000,00.

4) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu (3364.043)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3362)	Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten (3364.043)	4	4	100 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target program Pencalonan anggota DPRD Kabupaten diselenggarakan dimulai dari Bimtek tatacara pengajuan Daftar Calon, Pengajuan penelitian dokumen serta penetapan daftar calon anggota, Pengelolaan dokumen pencalonan hingga sinkronisasi data calon. Kegiatan tersebut berjalan lancar tanpa kendala dengan target yang terealisasi.

5) Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD (3364.047)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3364)	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan APK Peserta Pemilu (3364.047)	1	1	100 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dengan target program penyelenggaraan dukungan sarana dan prasana Kegiatan pengadaan Alat Petraga Kampanye (APK) Untuk peserta Pemilu Tahun 2019 meliputi 16 Partai Politik dan 28 DPD Provinsi Jawa timur terdiri dari Pengadaan Baliho dan Spanduk dengan rincian 10 Baliho dan 16 spanduk untuk Partai pilitik dan 10 spanduk untuk DPD.

6) Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3364)	Bimtek penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	2	2	100 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menghadiri undangan dari KPU RI dalam hal Bimtek pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu serentak tahun 2018 sebanyak 2 kali disamping itu juga menghadiri pelaksanaan bimtek yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi selama 1 kali.

7) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	3	3	100 %	Kegiatan

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3364)	Sosialisasi tahapan Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu (3364.050)				
---	--	--	--	--	--

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target jumlah kegiatan Sosialisasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dengan mengundang partai Politik peserta pemilu dengan bentuk kegiatannya sosialisasi terdiri dari Proses pendaftaran dan penyerahan data dukung, sampling data dukungan dan Verifikasi hingga sampai pada Penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 dengan dukungan anggaran dana sebesar Rp.55.300.000,00.

8) Pendidikan Pemilih Pemilu (3364.052)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3364)	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Pemilu (3364.052)	22	22	100 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat menyongsong pemilu 2019. Kegiatan berjalan lancar dan terkendali. Disamping itu kegiatan Pendidikan Pemilih dengan 4 segmen masing-masing segmen 3 kali pertemuan dan sosialisasi pemilih Pemula di sekolah sekolah dengan KPU Goes to school setingkat SMA/SMK sejumlah 4 kali, Kegiatan kursus kepemiluan sejumlah 5 kali serta forum warga berbasis keluarga yang pelaksanaannya merata di

seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan dengan target kegiatan sebanyak 10 kali. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih tersebut diatas diakumulasikan telah terlaksana kegiatan Sosialisasi sebanyak 31 kali pertemuan. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir sampai dengan bulan desember 2018.

C. REALISASI ANGGARAN

Setelah revisi DIPA ke 6, pagu KPU Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2018 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan DIPA Petikan KPU Kabupaten Pacitan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657825/2018 Revisi 05 Tanggal 13 November 2018 kode Digital Stamp DS.7063-1202-0410-1629.

Untuk mencapai kinerja sasaran tahun 2018 KPU Kabupaten Pacitan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 36.656.410.658.00 atau sebesar 91,71% dari pagu anggaran yang tersedia.

Realisasi Pagu Anggaran PerProgram KPU Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

No.	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	25.336.000	25.33.6000	24.989.000	98,63
2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	2.412.000	2.412.000	2.330.000	96,60
3	Pengelolaan Keuangan ,Perbendahraaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	78.223.000	78.223.000	76.663.000	98,01
4	Layanan Perkantoran	2.028.453.000	2.028.453.000	2.044.078.364	90,85
5	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/pemilihan	600.000	600.000	600.000	100,00
6	Layanan Pengadaan Logistik Pemilu	6.260.000	6.260.000	6.200.000	99,04
7	Pengoelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan,Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	191.350.000	213.993.000	199.517.750	93,24

8	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1.379.032.000	1.748.262.000	1.132.067.800	64,75
9	Analisis Capaian Kinerja KPU ,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2.200.000	2.200.000	2.100.000	95,45
10	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	42.304.000	42.304.000	29.881.000	70,63
11	Analisis Capaian Kinerja	3.300.000	3.300.000	2.917.500	88,41
12	Penyusunan Anggaran Pemilu	102.379.000	119.563.000	115.981.300	97,00
13	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	97.635.000	97.635.000	95.719.000	98,04
14	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	632.064.000	679.314.000	654.073.690	96,28
15	Layanan Teknologi Informasi Pemilu	35.436.000	35.436.000	34.990.000	98,74
16	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	84.630.000	110.156.000	109.197.500	99,13
17	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	901.876.000	1.267.072.000	1.266.972.000	99,99
18	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	7.554.125.000	10.545.941.000	10.203.741.000	96,76
19	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)	1.775.200.000	0	0	0
20	Laporan Persediaan (Stock Opname)	4.509.000	4.509.000	4.460.000	98,91
21	Pengelolaan Barang Milik Negara	5.170.000	5.170.000	5.100.000	98,65
22	Penyusunan Arsip Pemilu	6.514.000	6.514.000	2.944.000	45,19
23	Pengamanan Tahapan Pemilu	4.725.000	4.725.000	4.104.000	86,86
24	Layanan Perkantoran	458.373.000	458.373.000	448.295.300	97,80
25	Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	4.284.000	4.284.000	4.030.000	94,07
26	Kendaraan Bermotor	0	345.138.000	331.010.000	95,91
27	Penyuluhan Peraturan Perundangan-undangan Pemilu dan Pemilukada	2.540.000	2.540.000	1.855.000	73,03
28	Dana Kampanye Pemilu	178.172.000	178.172.000	161.894.650	90,86

29	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	0	8.988.000	3.837.400	42,69
30	Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu	229.086.000	229.086.000	110.515.000	48,24
31	Verifikasi Patai Politik Peserta Pemilu	196.774.000	196.774.000	142.132.500	72,23
32	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah ,Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi ,dan Daerah Rawan Konflik /Bencana	25.000.000	25.000.000	18.227.000	72,91
33	Rancangan Pedoman / Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu	12.512.000	12.512.000	11.601.000	92,72
34	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	82.879.000	82.879.000	80.122.500	96,67
35	Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	353.056.000	353.056.000	345.335.000	97,81
34	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR,DPD dan DPRD	6.300.000	285.830.000	245.066.200	85,74
35	Supervisi / Monitoring /Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	152.453.000	152.453.000	142.632.200	93,56
36	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	508.590.000	508.590.000	361.622.500	71,10
37	Pendidikan Pemilih Pemilu	161.300.000	161.300.000	157.685.000	97,76

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2018 dengan baik. Dari 3 (tiga) program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 37 (tiga puluh tujuh) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Pacitan BA (076) DIPA Petikan KPU Kabupaten Pacitan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657825/2018 Revisi 07 Tanggal 31 Desember 2018 kode Digital Stamp DS.7063-1202-0410-1629. Semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa kali revisi DIPA, revisi DIPA terakhir dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.253.968.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.580.458.154 dan sisanya sebesar Rp. 1.673.509.846 , sehingga realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 91,74 %.

Disamping kegiatan yang bersumber dari APBN, KPU Kabupaten Pacitan juga melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dalam rangka kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, yang pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.